



2022

POLICY BRIEF

Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
 Vol.4 No.1, 2022

PEMBERDAYAAN POLITIK MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA

Eva Rachmawati¹⁾

¹⁾Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan

Email: eva.rachmawatisolihin@gmail.com, vea@apps.ipb.ac.id

Isu Kunci

- Indonesia memiliki potensi wisata yang besar baik dari segi fisik, biologi (tumbuhan dan hewan) maupun sosial budaya
- Wisata merupakan salah satu prioritas pembangunan yang diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi masyarakat maupun lingkungan
- Masyarakat lokal masih sedikit yang menerima dampak positif dari pengembangan wisata
- Salah satu penyebabnya adalah rendahnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan atau pengambilan keputusan dalam pengembangan dan pengelolaan wisata di daerahnya.
- Diperlukan adanya kebijakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengembangan wisata sehingga mereka dapat terlibat secara aktif dalam perencanaan atau proses pengambilan keputusan dalam pengembangan wisata di daerahnya (Pemberdayaan Politik).
- Pemerintah telah merancang dan mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata, akan tetapi hasil yang dicapai belum sesuai dengan harapan.

Ringkasan

Pemberdayaan politik atau partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan wisata, merupakan salah satu faktor penting dalam pencapaian tujuan wisata berkelanjutan. Akan tetapi, pada kenyataannya, program tersebut belum mencapai hasil yang diharapkan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan program tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang dilaksanakan terfokus pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai penyelenggara wisata, dan bukan sebagai pengambil keputusan. Salah satu faktor pendukung keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya adalah lemahnya peraturan atau kebijakan pemerintah yang mengatur keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan wisata di wilayahnya. Kontribusi dari kajian ini adalah membantu stakeholder untuk dapat merancang program pemberdayaan yang dapat mengoptimalkan faktor pendukung tersebut misalnya dengan melaksanakan kegiatan pendidikan formal ataupun non formal yang berkelanjutan.

Pendahuluan

Latar Belakang

Di Indonesia, pembangunan pariwisata memiliki peran penting untuk meningkatkan partisipasi tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan berkontribusi terhadap penerimaan devisa negara (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 2010). Pada kenyataannya, dampak positif yang diterima, terutama oleh masyarakat local biasanya tidak sesuai dengan yang diharapkan (Rachmawati 2020). Salah satu penyebabnya adalah tidak seimbangnya pengaruh yang dimiliki oleh masyarakat dalam pengembangan wisata di wilayahnya (Rachmawati 2018). Kekuatan atau pengaruh yang tidak seimbang antara masyarakat lokal dengan pemangku kepentingan dalam kegiatan pengambilan keputusan seringkali membatasi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat pariwisata (Coria dan Calfucura 2012).

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan pemberdayaan masyarakat di dalam dan melalui pengembangan pariwisata (Ahmad dan Talib, 2015). Pemberdayaan merupakan 'proses' yang mengacu pada upaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan seluruh anggota masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata (pada tahap awal, tahap pelaksanaan atau implementasi, pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan wisata) (Boley *et al.* 2015; Boley dan McGehee 2014). Proses pemberdayaan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan wisata dan membantu meningkatkan kesempatan untuk setiap anggota atau kelompok masyarakat agar mereka dapat memiliki kendali lebih besar untuk menentukan kondisi mereka di masa yang akan datang dengan cara terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan proses perencanaan (Wall dan Mathieson 2006). Pemberdayaan menawarkan cara bagi masyarakat lokal untuk memiliki

kontrol atas pengembangan atau pembangunan tertentu di wilayah mereka untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan manfaat dari pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (Aghazamani dan Hunt 2017).

Urgensi

Partisipasi aktif masyarakat dalam aspek perencanaan atau pengambilan keputusan pengembangan wisata di wilayahnya menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pencapaian tujuan wisata berkelanjutan. Pentingnya studi ini adalah bahwa dengan mengevaluasi faktor-faktor yang mungkin berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan pemberdayaan dalam masyarakat pengembangan wisata di Indonesia. Pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang hambatan pemberdayaan masyarakat dapat membantu pembuat kebijakan pariwisata untuk menyusun strategi yang tepat untuk merencanakan strategi keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata untuk mencapai hasil yang maksimal.

Tujuan dari kajian ini adalah:

1. Mengkaji upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat program pemberdayaan masyarakat, terutama pemberdayaan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan wisata.

Ikhtisar tentang temuan

Keterlibatan atau partisipasi masyarakat lokal dalam tahapan perencanaan pembangunan wisata di wilayahnya dinilai sebagai salah satu alat untuk mencapai pemberdayaan masyarakat (Moscardo *et al.* 2013; Park *et al.* 2014; Rasoolimanesh *et al.* 2017). Jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan wisata, para *stakeholder* yang terlibat dapat memperluas dan mengembangkan visi terkait pembangunan wisata sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat local yang nantinya akan terdapat

dan juga merancang kegiatan mereka sehingga sesuai dengan gambaran keseluruhan dari visi tersebut. Selain itu juga, para pihak yang terlibat tersebut dapat merancang dan menentukan mekanisme untuk berkoordinasi dan berkolaborasi antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk mengurangi tingkat persaingan dan terjadinya konflik internal (Li & Hunter 2015). Keterlibatan masyarakat dapat mengarah pada identifikasi dan penyelesaian masalah dan pemahaman yang lebih besar, dan dukungan untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan (Park *et al.* 2014). Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat memfasilitasi kelancaran pelaksanaan rencana pariwisata melalui tanggung jawab dan kepemilikan kolektif. Hal ini membuat keputusan yang diambil dapat dikatakan lebih sah karena disepakati semua pihak dan juga dapat lebih mudah untuk diimplementasikan (Li dan Hunter 2015).

Hasil dan Pembahasan

1. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Wisata di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka pembangunan kepariwisataan nasional yang menjadi arah kebijakan, di mana pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan dipandang sebagai bagian penting dari proses dan hasil (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 2010). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Pariwisata Pemerintah bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kesempatan kerja dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat struktur kelembagaan sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kemampuan atau kapasitas untuk menjadi aktor yang andal dan dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan pariwisata di Indonesia (Kementerian

Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia 2011). Beberapa strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam program pemberdayaan ini antara lain pembangunan infrastruktur wisata (misalnya akses menuju lokasi wisata, akomodasi seperti misalnya penginapan, hotel atau restoran) dan peningkatan kemampuan atau kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kegiatan wisata. Contoh dari kegiatan tersebut misalnya peningkatan pengetahuan melalui kegiatan pelatihan-pelatihan. Selain itu juga melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pelestarian budaya, keterampilan dalam bidang kuliner, pengelolaan pariwisata, pembuatan kerajinan tangan, dan peningkatan kemampuan berbahasa) (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia 2011).

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa meskipun tujuan dari pemberdayaan masyarakat tersebut adalah untuk memperkuat kondisi kelembagaan, akan tetapi fokus utamanya masih pada pemberdayaan di aspek ekonomi dan mempersiapkan anggota masyarakat sebagai pihak pelaksana atau penyelenggara pariwisata (*tourism organizer*), dan bukan sebagai pihak pengambil keputusan (*decision-maker*). Padahal mempersiapkan masyarakat untuk menjadi pengambil keputusan (pemberdayaan politik) dalam pengembangan wisata sangatlah penting. Peran penyelenggara pariwisata mengacu pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, misalnya menjadi tuan rumah atau pemandu yang lebih baik. Peran pengambil keputusan mengacu pada kapasitas atau kemampuan untuk memutuskan apa yang ingin mereka lakukan terkait dengan pengembangan pariwisata di daerah mereka.

Pemberdayaan politik adalah suatu aspek pemberdayaan yang fokus pada peningkatan kapasitas atau kemampuan anggota masyarakat lokal sehingga mereka mampu untuk mengontrol arah kegiatan atau

pembangunan, tingkat dan tipe atau jenis pengembangan wisata di wilayahnya (Boley *et al.* 2015; Scheyvens 1999). Pemberdayaan politik menyiratkan bahwa suara dan perhatian masyarakat memandu, atau disertakan, dalam pengembangan pariwisata, mulai dari perencanaan hingga implementasi (Boley dan McGehee 2014; Scheyvens 1999).

2. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Politik

Salah satu faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan politik masyarakat adalah pengetahuan (Rachmawati 2018; Rachmawati *et al.* 2021). Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui kegiatan pendidikan formal ataupun non-formal. Berkaitan dengan pemberdayaan politik, pengetahuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan haknya untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan memberikan keterampilan untuk melakukannya.

Faktor penghambat pencapaian tujuan dari pemberdayaan masyarakat antara lain adalah adanya gap atau ketidakjelasan dalam peraturan atau kebijakan pemerintah terkait keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata (*Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia & the International Labour Organization* 2012; Rachmawati 2018; Rachmawati *et al.* 2021). Regulasi nasional merupakan faktor penting dalam pemberdayaan masyarakat karena mengatur struktur peluang dalam pemberdayaan masyarakat (Lenao dan Basupi 2016). Namun, beberapa negara berkembang seringkali mengalami ketiadaan regulasi terkait pemberdayaan masyarakat (Lenao dan Basupi 2016; United Nations 2018).

Struktur peluang agar anggota masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam suatu kegiatan atau pembangunan dapat diawali dengan tingkat atau frekuensi kehadiran dalam setiap event atau kegiatan terkait dengan

pembangunan wisata tersebut. Selain itu juga melalui penyelenggaraan suatu Lembaga pengelola baik itu berbentuk formal maupun non-formal. Selain itu juga peluang anggota masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam suatu kegiatan pembangunan ditentukan oleh keberadaan aturan main termasuk diantaranya kebijakan, peraturan, norma dan kebiasaan yang mengatur masyarakat berperilaku dalam kesehariannya (*Knight dan Cottrell* 2016). Peraturan yang baik dan mendukung partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk dapat memastikan adanya kesempatan yang sama bagi semua anggota masyarakat agar mereka dapat mengakses sumber daya, baik itu dalam bentuk fisik maupun non-fisik yang sangat penting bagi pemberdayaan masyarakat (Cao 2015; Knight dan Cottrell 2016). Akan tetapi, pada kenyataannya, di satu sisi seringkali terjadi duplikasi pada peraturan atau kebijakan yang berlaku, dan disisi lain tidak adanya regulasi yang diperlukan untuk mengatur mekanisme partisipasi masyarakat (Setiawan dan Kusmawan 2016). Selain itu juga seringkali ada banyak kebijakan yang saling berlawanan (kontradiktif) yang mengakibatkan terjadinya kebingungan terhadap implementasi regulasi yang harus diikuti (Clifton 2013).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), jika dilihat secara konseptual, tujuannya memfokuskan pada peningkatan partisipasi atau keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan. Akan tetapi pada pelaksanaannya tidak semudah yang tertulis dalam dokumen. Terdapat berbagai tantangan untuk dapat mencapai tujuan dan pencapaian konsep yang diharapkan. Pertama, tujuan ini pada kenyataannya cenderung hanya mengutamakan tercapainya target program dan proyek (misalnya, jumlah organisasi masyarakat yang dibentuk, jumlah pelatihan yang dilakukan dan jumlah peserta yang berpartisipasi, pembangunan/perbaikan infrastruktur), dengan

penekanan pada hasil ekonomi. Tujuannya bukan untuk mendorong atau meningkatkan kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan pariwisata, oleh karena itu pelaksanaannya cenderung *top-down*, mengabaikan nilai-nilai lokal dan meminimalkan partisipasi masyarakat, dengan fokus pada tujuan dan nilai pihak luar (Hadi 2010). Kedua, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan (misalnya pengambil keputusan dan masyarakat) yang menyebabkan program atau kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai atau memenuhi kebutuhan masyarakat (Fitriani dan Rusli 2014). Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat terkait program pemberdayaan menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam program tersebut (Fitriani dan Rusli 2014; Hadi 2010).

Kesimpulan

Pemerintah Indonesia telah merancang dan mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengembangan wisata. Fokus dari program tersebut lebih pada pemberdayaan ekonomi, belum menyentuh aspek pemberdayaan politik. Hal ini menyebabkan Sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmati manfaat dari pembangunan wisata tersebut.

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat adalah pengetahuan. Sedangkan salah satu faktor yang menghambat tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat adalah kurangnya atau lemahnya kebijakan yang mendukung keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan atau pengambilan keputusan terkait pengembangan wisata di wilayahnya.

Rekomendasi

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki peranan penting dalam

pencapaian tujuan wisata berkelanjutan. Oleh karena itu masyarakat harus menerima Pendidikan berkelanjutan terkait pengembangan pariwisata (Guevara 1996 seperti dikutip dalam Scheyvens 2002). Para stakeholder harus melakukan analisis awal mengenai kondisi kapasitas masyarakat pada saat ini sehingga bisa diketahui hal apa saja yang perlu diberikan kepada masyarakat. Selain itu, pendidikan, pengetahuan dan informasi yang diberikan tidak sebatas pengetahuan sebagai penyelenggara wisata, akan tetapi juga sebagai pengambilan keputusan.

Dalam pengembangan pariwisata di tingkat lokal, perlu dibentuk suatu forum atau wadah untuk memfasilitasi upaya pengambilan keputusan berbasis masyarakat. Ini dapat berupa sebuah forum, lembaga pemerintahan lokal yang telah ada atau kelompok masyarakat yang dibentuk secara khusus seperti misalnya komite pariwisata. Kelompok atau Lembaga masyarakat ini kemudian diberikan mandat untuk bertindak, melakukan kegiatan atau melakukan pengambilan keputusan atas nama masyarakat dan harus mengekspresikan kepentingan masyarakat (Scheyvens 2002). Untuk memastikan bahwa kepentingan seluruh kelompok masyarakat telah terwakili dalam pembangunan, kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan dan kebutuhan yang beragam dan berbeda dalam masyarakat, termasuk misalnya kelompok perempuan, pemuda dan kelompok kurang beruntung lainnya, harus memiliki perwakilan di forum tersebut (Scheyvens 1999). Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan setiap kelompok penduduk desa yang berbeda, daripada menggeneralisasi masyarakat secara keseluruhan karena akan ada perbedaan kemampuan, sumber daya dan tuntutan yang mempengaruhi perasaan individu. menuju pemberdayaan (Weng dan Peng 2014). Jika sebuah komunitas ingin diberdayakan secara politik oleh pariwisata, suara dan perhatian

mereka harus memandu pengembangan pariwisata dari tahap awal hingga implementasi.

Daftar Pustaka

- Aghazamani, Y., & Hunt, C. A. (2017). Empowerment in tourism: A review of peer-reviewed literature. *Tourism Review International*, 21(4), 333–346. <https://doi.org/https://doi.org/10.3727/154427217X15094520591321>
- Ahmad, M. S., & Talib, N. B. A. (2015). Empirical investigation of community empowerment and sustainable development: Quantitatively improving qualitative model. *Quality & Quantity*, 49(2), 637–655. <https://doi.org/10.1007/s11135-014-0014-y>
- Boley, B. B., Maruyama, N., & Woosnam, K. M. (2015). Measuring empowerment in an eastern context: Findings from Japan. *Tourism Management*, 50(0), 112–122. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2015.01.011>
- Boley, B. B., & McGehee, N. G. (2014). Measuring empowerment: Developing and validating the Resident Empowerment through Tourism Scale (RETS). *Tourism Management*, 45(0), 85–94. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2014.04.003>
- Cao, X. (2015). Challenges and potential improvements in the policy and regulatory framework for sustainable tourism planning in China: The case of Shanxi Province. *Journal of Sustainable Tourism*, 23(3), 455–476. <https://doi.org/10.1080/09669582.2014.957207>
- Clifton, J. (2013). Refocusing conservation through a cultural lens: Improving governance in the Wakatobi National Park, Indonesia. *Marine Policy*, 41, 80–86. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2012.12.015>
- Fitriani, & Rusli, Z. (2014). Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 1(1).
- Hadi, A. P. (2010). Tinjauan terhadap berbagai program pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA).
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. (2010). Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010-2014. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Knight, D. W., & Cottrell, S. P. (2016). Evaluating tourism-linked empowerment in Cuzco, Peru. *Annals of Tourism Research*, 56, 32–47. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2015.11.007>
- Lenao, M., & Basupi, B. (2016). Ecotourism development and female empowerment in Botswana: A review. *Tourism Management Perspectives*, 18, 51–58. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.021>
- Li, Y., & Hunter, C. (2015). Community involvement for sustainable heritage tourism: A conceptual model. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 5(3), 248–262. <http://dx.doi.org/10.1108/JCHMSD-08-2014-0027>
- Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia, & the International Labour Organization. (2012). Strategic Plan Sustainable Tourism and Green Jobs for Indonesia. International Labour Organization.
- Moscardo, G., Schurmann, A., Konovalov, E., & McGehee, N. G. (2013). Using tourism to build social capital in communities: New pathways to sustainable tourism futures.

- Park, D.-B., Doh, K.-R., & Kim, K.-H. (2014). Successful managerial behaviour for farm-based tourism: A functional approach. *Tourism Management*. 45(0): 201–210. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2014.04.007>
- Rachmawati, E. (2018). Tourism and Community Empowerment: Critical Insight from Indonesia. In *Tourism, Sport and Society: Vol. Doctor of*. Lincoln University.
- Rachmawati, E. (2020). Tourism and community empowerment at Gunung Leuser National Park, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/528/1/012001>
- Rachmawati, E., Fountain, J., & MacKay, M. (2021). Does Tourism Could Empower Women in Political Dimension? THE 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOURISM AND ENTREPRENEURSHIP (ICTE) 2020 "Addressing New Challenges of Sustainable Tourism Business in the Society 5.0," 1–13. Goodwood Publishing
- Rasoolimanesh, S. M., Ringle, C. M., Jaafar, M., & Ramayah, T. (2017). Urban vs. rural destinations: Residents' perceptions, community participation and support for tourism development. *Tourism Management*. 60: 147–158. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2016.11.019>
- Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*. 20(2): 245–249. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0261-5177\(98\)00069-7](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00069-7)
- Setiawan, D., & Kusmawan, A. (2016). Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa: Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horizontal Undang-Undang Desa dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial. *Perkumpulan INISIATIF*.
- United Nations. (2018). World economic situation and prospects 2018. United Nations.
- Wall, G., & Mathieson, A. (2006). *Tourism: Change, Impacts, and Opportunities*. Pearson Education.



**Direktorat
Publikasi Ilmiah
dan Informasi Strategis**

Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB (DPIS IPB) melaksanakan tugas dalam mengkaji dan mengelola informasi terkait isu-isu strategis untuk meningkatkan peran IPB dalam kebijakan pertanian, kelautan dan biosains tropika, serta mendorong peningkatan publikasi ilmiah untuk mendukung IPB menjadi World Class University.

Penyunting

Eva Anggraini
Alfian Helmi

Tata letak:

Rizal Gusdinar
Bintang Aditia Tri Wibowo

Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS), IPB University
Gedung LSI Lantai 1, Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor - Indonesia 16680
Website: <https://dpis.ipb.ac.id>

